

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan dan penyajian buku Ringkasan dan Telaahan terhadap Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun 2017, yang disusun oleh Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara (PKAKN) Badan Keahlian DPR RI sebagai sistem pendukung dalam memberikan dukungan keahlian kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, ini dapat terselesaikan.

Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun 2017 yang telah disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR RI Tanggal 3 Oktober 2017, memuat 687 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang terdiri atas 645 LHP keuangan (94%), 9 LHP kinerja (1%) dan 33 LHP dengan tujuan tertentu (DTT) (5%). Secara umum, hasil pemeriksaan BPK tersebut mengungkapkan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan memuat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap 469 (73%) dari 645 laporan keuangan, hasil pemeriksaan atas kinerja memuat kesimpulan kinerja yang cukup efektif, dan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDFTT) memuat kesimpulan adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

BPK mengungkapkan 9.729 temuan yang memuat 14.997 permasalahan, meliputi 7.284 (49%) permasalahan kelemahan sistem pengendalian intern (SPI) dan 7.549 (50%) permasalahan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan senilai Rp25,14 triliun, serta 164 (1%) permasalahan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan senilai Rp2,25 triliun.

Dari permasalahan ketidakpatuhan tersebut, sebanyak 4.707 (62%) senilai Rp25,14 triliun merupakan permasalahan ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian sebanyak 3.135 (67%) permasalahan senilai Rp1,81 triliun, potensi kerugian sebanyak 484 (10%) permasalahan senilai Rp4,89 triliun, dan kekurangan penerimaan sebanyak 1.088 (23%) permasalahan senilai Rp18,44 triliun, dan terdapat 2.842 (38%) permasalahan ketidakpatuhan yang mengakibatkan penyimpangan administrasi.

Kemudian dari 164 permasalahan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan senilai Rp2,25 triliun, terdapat 12 (7%) permasalahan ketidakhematan senilai Rp11,96 miliar, 30 (18%) permasalahan ketidakefisienan senilai Rp574,31 miliar, dan 122 (75%) permasalahan ketidakefektifan senilai Rp1,67 triliun. Terhadap permasalahan ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian dan kekurangan penerimaan, pada saat pemeriksaan entitas yang diperiksa telah menindaklanjuti dengan menyerahkan aset atau menyektor ke kas negara/daerah senilai Rp509,61 miliar (2%).

Khususnya pada Kementerian/Lembaga/Badan mitra kerja Komisi VII terdapat 9 entitas, 2 entitas yang memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) yakni Badan Informasi Geospasial dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sedangkan 7 entitas lainnya sudah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Total Anggaran Belanja mitra Komisi VII sebesar Rp62.548.723.337.000,00 dan Realisasi Belanja sebesar Rp52.723.544.164.928,00. Total Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Mitra kerja Komisi VII Tahun 2016 sebesar Rp47.557.757.451.199,00. Sedangkan klasifikasi temuan BPK atas ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan pada mitra Komisi VII terdapat indikasi kerugian negara sebesar Rp49.561.000.000,00, potensi kerugian Rp10.421.530.000 dan kekurangan penerimaan negara sebesar Rp204.357.340.000,00.

Ringkasan dan Telaahan ini dapat digunakan oleh Komisi VII untuk melakukan pendalaman atas kinerja mitra kerja dalam melaksanakan program-program prioritas pembangunan nasional mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi yang dilakukan secara transparan dan akuntabel untuk dapat memberikan manfaat pada kesejahteraan rakyat, serta dapat melengkapi sudut pandang atas kualitas Opini BPK dan rekomendasi BPK terhadap kinerja sektor publik.

Semoga buku Ringkasan dan Telaahan ini dapat dimanfaatkan oleh Komisi VII sebagai fungsi pengawasan dalam Rapat-Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat dan pada saat kunjungan kerja komisi maupun kunjungan kerja perorangan dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK dengan melakukan pembahasan sesuai dengan kewenangannya.

Jakarta, Oktober 2017

**Kepala Pusat Kajian  
Akuntabilitas Keuangan  
Negara**



**DRS. HELMIZAR**

**NIP. 19640719 199103 1 003**

## DAFTAR ISI

1. Kata Pengantar Kepala Pusat KAKN.....	i
2. Daftar Isi.....	iv
3. Telaahan Kementerian.....	1
3.1. <b>Badan Informasi Geospasial</b>	1
3.1.1. Gambaran Umum.....	1
3.1.2. Daftar Temuan.....	3
3.1.3. Telaahan atas Temuan Sistem Pengendalian Intern.....	5
3.1.4. Telaahan atas Temuan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan.....	21
3.2. <b>Badan Pengawas Tenaga Nuklir</b>	31
3.2.1. Gambaran Umum.....	31
3.2.2. Daftar Temuan.....	33
3.2.3. Telaahan atas Temuan Sistem Pengendalian Intern.....	35
3.2.4. Telaahan atas Temuan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan.....	41
3.3. <b>Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi</b>	57
3.3.1. Gambaran Umum.....	57
3.3.2. Daftar Temuan.....	59
3.3.3. Telaahan atas Temuan Sistem Pengendalian Intern.....	61
3.3.4. Telaahan atas Temuan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan.....	73
3.4. <b>Badan Tenaga Nuklir</b>	95
3.4.1. Gambaran Umum.....	95
3.4.2. Daftar Temuan.....	97
3.4.3. Telaahan atas Temuan Sistem Pengendalian Intern.....	99
3.4.4. Telaahan atas Temuan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan.....	113

<b>3.5.</b>	<b>Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral</b>	135
3.5.1.	Gambaran Umum.....	135
3.5.2.	Daftar Temuan.....	137
3.5.3.	Telaahan atas Temuan Sistem Pengendalian Intern.....	139
3.5.4.	Telaahan atas Temuan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan.....	165
<b>3.6.</b>	<b>Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia</b>	171
3.6.1.	Gambaran Umum.....	171
3.6.2.	Daftar Temuan.....	173
3.6.3.	Telaahan atas Temuan Sistem Pengendalian Intern.....	175
3.6.4.	Telaahan atas Temuan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan.....	187
<b>3.7.</b>	<b>Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional</b>	197
3.7.1.	Gambaran Umum.....	197
3.7.2.	Daftar Temuan.....	199
3.7.3.	Telaahan atas Temuan Sistem Pengendalian Intern.....	201
3.7.4.	Telaahan atas Temuan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan.....	205
<b>3.8.</b>	<b>Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan</b>	211
3.8.1.	Gambaran Umum.....	211
3.8.2.	Daftar Temuan.....	213
3.8.3.	Telaahan atas Temuan Sistem Pengendalian Intern.....	215
3.8.4.	Telaahan atas Temuan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan.....	219
<b>3.9.</b>	<b>Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi</b>	229
3.9.1.	Gambaran Umum.....	229
3.9.2.	Daftar Temuan.....	231
3.9.3.	Telaahan atas Temuan Sistem Pengendalian Intern.....	235
3.9.4.	Telaahan atas Temuan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan.....	237
<b>3.10.</b>	<b>PDTT PT Freeport Indonesia</b>	239
3.10.1.	Gambaran Umum.....	239
3.10.2.	Daftar Temuan.....	241
3.10.3.	Telaahan atas Temuan PDTT.....	243

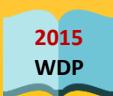
<b>3.11. PDTT Loan International Bank for Reconstruction and Development No. 8245-ID Tahun 2016</b>	<b>253</b>
3.11.1. Gambaran Umum.....	253
3.11.2. Daftar Temuan.....	255
3.11.3. Telaahan atas Temuan Sistem Pengendalian Intern.....	257
3.11.4. Telaahan atas Temuan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan.....	261

# HASIL PEMERIKSAAN BPK RI ATAS LAPORAN KEUANGAN BADAN INFORMASI GEOSPASIAL TAHUN 2016



Pemeriksaan atas Laporan Keuangan (LK) Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2016 bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran LK BIG dengan memperhatikan:

- Kesesuaian LK BIG dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
- Kecukupan pengungkapan informasi keuangan dalam LK sesuai dengan pengungkapan yang seharusnya dibuat seperti disebutkan SAP;
- Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan pelaporan keuangan; dan
- Efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI).



BPK memberikan opini:  
**Wajar Dengan  
Pengecualian  
(WTP)**

## Laporan Realisasi Anggaran

- Pendapatan(PNBP)  
Rp39.653.762.632,00
- Anggaran Belanja  
Rp685.231.100.000,00
- Realisasi Belanja  
Rp611.228.714.408,00 (89.20%)

## NERACA

- Aset  
Rp 2.294.173.288.530,00
- Kewajiban  
Rp660.546.638,00
- Ekuitas  
Rp2.293.512.741.892,00

## Temuan

### Kepatuhan Perundang- undangan 7 Temuan

- Kerugian  
Rp2.803,06 Juta

Kepatuhan  
50%

SPI  
50%

### Sistem Pengendalian Intern

7 Temuan

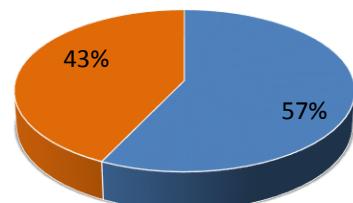


# PERMASALAHAN

## Sistem Pengendalian Intern

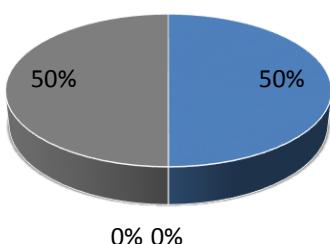


- Akuntansi dan Pelaporan
- Pelaksanaan Anggaran
- Kelemahan Struktur



## Kepatuhan Terhadap Perundang-undangan

- Kerugian Negara
- Potensi Kerugian Negara
- Kekurangan Penerimaan
- Administrasi



Berikut ini merupakan hasil temuan yang diungkap oleh BPK RI atas pemeriksaan LK BIG Tahun 2016:

NO	TEMUAN
	SISTEM PENGENDALIAN INTERN
1.1	Sistem Pengendalian Pendapatan
1.1.1	Penerimaan atas pemanfaaan BMN tidak tertib
1.2	Sistem Pengendalian Belanja
1.2.1.	Belanja sewa kendaraan dinas Tahun 2016 sebesar Rp1,92 miliar tidak tertib.
1.3	Sistem Pengendalian Aset
1.3.1.	Penatausahaan Persediaan pada Pusat Pengelolaan dan Penyebaran Informasi Geospasial dan Pusat Penelitian, Promosi, dan Kerjasama Tidak Tertib
1.3.2.	Penatausahaan Aset Tetap Tanah Mess Pabuaran Belum Memadai
1.3.3.	Aset Tak Berwujud berupa Hasil Kajian/Penelitian dan ATB Lainnya senilai Rp1,44 triliun belum diamortisasi
1.3.4.	Aset Tak Berwujud Lainnya belum dinilai dan belum disajikan pada Neraca per 31 Desember 2016
1.3.5.	Pengukuran pada perolehan Aset Tak Berwujud tidak tepat
KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	
1.1	Pendapatan
1.1.1.	Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun Anggaran 2016 terlambat disetor
1.2	Belanja
1.2.1.	Kelebihan Pembayaran Tunjangan Struktural dan Fungsional atas Pegawai Tugas Belajar Sebesar Rp20,73 Juta
1.2.2.	Kelebihan Pembayaran Uang Makan Pegawai Sebesar Rp412,34 Juta
1.2.3.	Kelebihan Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai Sebesar Rp99,04 Juta
1.2.4.	Kelebihan pembayaran perjalanan dinas luar negeri Tahun 2016 untuk komponen uang harian sebesar Rp308,85 juta
1.2.5.	Selisih pembayaran perjalanan dinas Tahun 2016 minimal sebesar Rp291,40 juta
1.2.6.	Kelebihan pembayaran atas Biaya Langsung Non Personil pada Pekerjaan Jasa Konsultansi sebesar Rp1,96 miliar dan selisih harga tiket atas biaya perjalanan minimal sebesar Rp138,91 juta

Berdasarkan temuan diatas, temuan yang akan kami bahas lebih lanjut adalah temuan yang menurut BPK memuat pokok-pokok kelemahan yang material baik dalam SPI maupun Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

# HASIL PEMERIKSAAN BPK RI ATAS LAPORAN KEUANGAN BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR TAHUN 2016



Pemeriksaan atas Laporan Keuangan (LK) Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten) Tahun 2016 bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran LK Bapeten dengan memperhatikan:

- Kesesuaian LK Bapeten dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
- Kekurungan pengungkapan informasi keuangan dalam LK sesuai dengan pengungkapan yang seharusnya dibuat seperti disebutkan SAP;
- Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan pelaporan keuangan; dan
- Efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI).



BPK memberikan opini:  
**Wajar Tanpa  
Pengecualian  
(WTP)**

## Laporan Realisasi Anggaran

- Pendapatan(PNBP)  
Rp13.599.751.225,00
- Anggaran Belanja  
Rp170.852.597.000,00
- Realisasi Belanja  
Rp152.256.324.412,00 (89.12%)



## NERACA

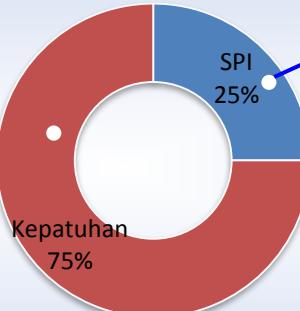
- Aset  
Rp 79.335.262.442,00
- Kewajiban  
Rp193.035.613,00
- Ekuitas  
Rp79.142.226.829,00



## Temuan

### Kepatuhan Perundang- undangan 6 Temuan

- Kerugian  
Rp16,42 Juta
- Kekurangan Penerimaan  
Rp38,20 Juta



### Sistem Pengendalian Intern

#### 2 Temuan



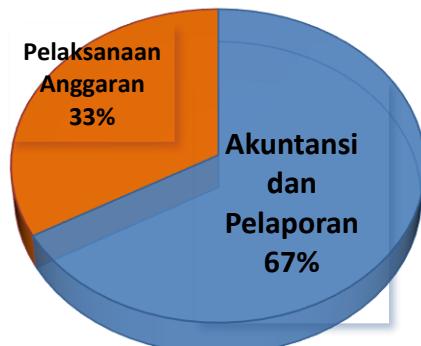
# PERMASALAHAN

## Sistem Pengendalian Intern

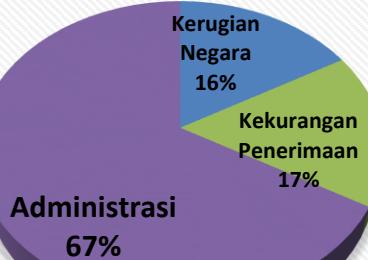
Akuntansi dan Pelaporan → 2 Permasalahan

Pelaksanaan Anggaran → 1 Permasalahan

Kelemahan Struktur → Tidak ADA Permasalahan



## Kepatuhan Terhadap Perundang-undangan



•Kerugian Negara → 1 Permasalahan

•Potensi Kerugian Negara → Tidak Ada Permasalahan

•Kekurangan Penerimaan → 1 Permasalahan

•Administrasi → 4 Permasalahan

Berikut ini merupakan hasil temuan yang diungkap oleh BPK RI atas pemeriksaan LK Bapeten Tahun 2016:

NO	TEMUAN
<b>SISTEM PENGENDALIAN INTERN</b>	
1.1	Sistem Pengendalian Aset
1.1.1.	Pengelolaan Aset Tetap Peralatan dan Mesin Belum Sepenuhnya Tertib
1.1.2.	Kesalahan Pencatatan BMN Berupa Tanda Penghargaan pada Akun Aset Tetap Peralatan dan Mesin
<b>KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</b>	
1.1	Belanja
1.1.1.	Kelebihan Pembayaran atas Kekurangan Volume Pekerjaan Pembuatan Kanopi Parkir Gedung A Sebesar Rp16,43 juta
1.1.2.	Proses Pengadaan Sistem Komputasi Kinerja Tinggi Tidak Sesuai Ketentuan dan Sanksi Denda Keterlambatan Sebesar Rp38,20 Juta Belum Disetorkan ke Kas Negara
1.1.3.	Hasil Pengadaan Berupa <i>Software</i> Perangkat Lunak Analisis Dinamika Fluida Belum Dimanfaatkan Secara Optimal
1.2	Aset
1.2.1	Penyetoran Sisa Tambahan Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran Sebesar Rp142,00 Juta Tidak Tepat Waktu
1.2.2.	Peralatan <i>Radiation Portal Monitor</i> yang Berasal dari Hibah IAEA Belum Sepenuhnya Dimanfaatkan
1.2.3.	Kebijakan Penghentian Sementara atas Pembangunan Gedung C Belum Didukung Rencana yang Jelas

Berdasarkan temuan diatas, temuan yang akan kami bahas lebih lanjut adalah temuan yang menurut BPK memuat pokok-pokok kelemahan yang material baik dalam SPI maupun Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

# HASIL PEMERIKSAAN BPK RI ATAS LAPORAN KEUANGAN BADAN PENGAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI TAHUN 2016



Pemeriksaan atas Laporan Keuangan (LK) Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Tahun 2016 bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran LK BPPT dengan memperhatikan:

- Kesesuaian LK BPPT dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
- Kecukupan pengungkapan informasi keuangan dalam LK sesuai dengan pengungkapan yang seharusnya dibuat seperti disebutkan SAP;
- Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan pelaporan keuangan; dan
- Efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI).



BPK memberikan opini:  
**Wajar Tanpa  
Pengecualian  
(WTP)**

## Laporan Realisasi Anggaran

- Pendapatan(PNBP)  
Rp158.880.732.132,00
- Anggaran Belanja  
Rp953.814.381.000,00
- Realisasi Belanja  
Rp896.779.803.016,00 (94.02%)

## NERACA

- Aset  
Rp2.358.645.201.346,00
- Kewajiban  
Rp9.622.263.494,00
- Ekuitas  
Rp2.349.022.937.852,00

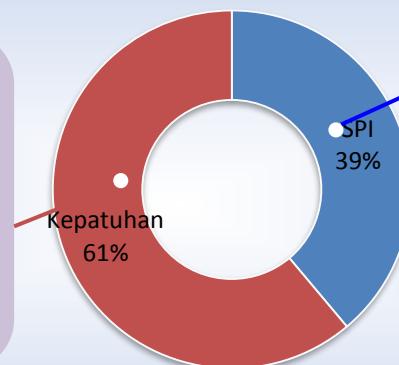
## Temuan

### Kepatuhan Perundang- undangan 11 Temuan

- Kerugian  
Rp7.551,09 Juta
- Potensi Kerugian  
Rp10.276,99 Juta
- Kurang Penerimaan  
Rp216,45Juta

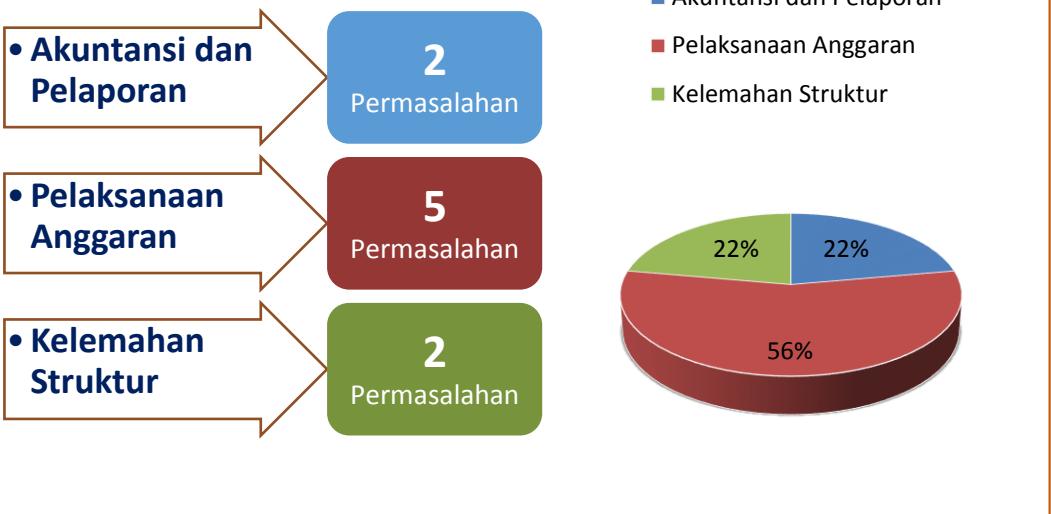


### Sistem Pengendalian Intern 7 Temuan



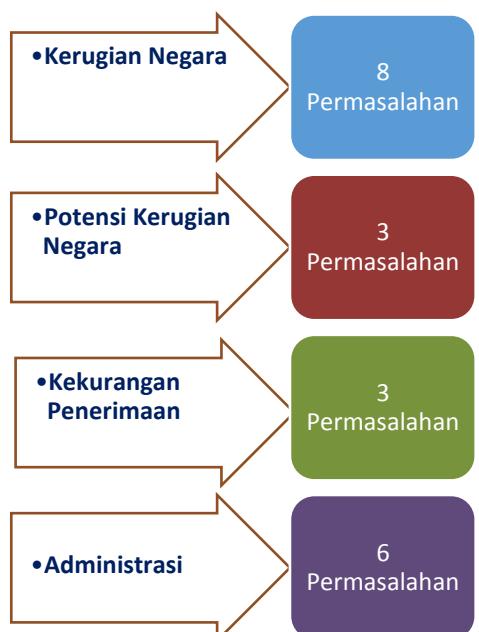
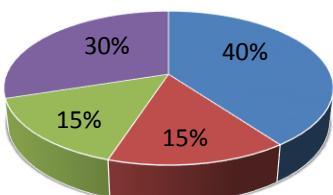
# PERMASALAHAN

## Sistem Pengendalian Intern



## Kepatuhan Terhadap Perundang-undangan

- Kerugian Negara
- Potensi Kerugian Negara
- Kekurangan Penerimaan
- Administrasi



Berikut ini merupakan hasil temuan yang diungkap oleh BPK RI atas pemeriksaan LK BPPT Tahun 2016

NO	TEMUAN
<b>SISTEM PENGENDALIAN INTERN</b>	
1.1	Sistem Pengendalian Belanja
1.1.1	Perencanaan Anggaran untuk Kegiatan Strategi Pemasaran <i>Techno Park</i> serta Pengembangan dan Penerapan Strategi Pemasaran Tidak Mencerminkan Kebutuhan Pusyantek
1.2	Sistem Pengendalian Aset
1.2.1.	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan pada Pusyantek Tidak Tertib
1.2.2.	Penyisihan Piutang BPPT Belum Seluruhnya Mengikuti PMK Nomor 69/PMK.06/2014 dan Penagihan Piutang Macet Belum Optimal
1.2.3.	Penatausahaan Persediaan pada Satker B2TMC, BTB, dan BT2MP Tidak Tertib
1.2.4.	Tarif PNBP atas Penjualan Beras Sehat Belum Ditetapkan dan Hasil Penjualan Beras Sehat pada Balai Besar Teknologi Pati Sebesar Rp1,05 Juta Belum Disetor
1.2.5.	Penggunaan Aset Milik Kemenristekdikti oleh BPPT Belum Ditetapkan Status Penggunaannya
<b>KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</b>	
1.1	Pendapatan
1.1.1.	PNBP pada Pusyantek BPPT Kurang Diterima Sebesar Rp193,08 Juta
1.1.2.	Permasalahan atas Pengelolaan Pendapatan dari Pemanfaatan Aset BPPT Berlarut-larut
1.2	Belanja
1.2.1.	Kelebihan Pembayaran Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Sebesar Rp215,57 Juta
1.2.2.	Kekurangan Volume dan Kelebihan Pembayaran atas Realisasi Belanja Barang dan Jasa pada Satker BTSK, BTB dan Setama Sebesar Rp328,86 Juta
1.2.3.	Kelebihan Pembayaran atas Pelaksanaan Kegiatan Perjalanan Dinas Dalam Bentuk Paket Meeting Dalam Kota dan Luar Kota Sebesar Rp461,35 Juta dan Realisasi Belanja Barang Sebesar Rp145,23 Juta Tidak Didukung Bukti Pertanggungjawaban yang Memadai
1.2.4.	Sisa Biaya Kegiatan Insentif Riset Sebesar Rp1,98 Miliar Tidak Dikembalikan ke Kas Negara
1.2.5.	Realisasi Belanja Tidak Sesuai Klasifikasi Anggaran Sebesar Rp281,82 Juta
1.2.6.	Realisasi Pembayaran Uang Lembur Melebihi Ketentuan Sebesar Rp60,89 Juta
1.2.7.	Hasil Pengadaan Berupa Transformator Senilai Rp480,15 Juta Belum Dimanfaatkan
1.3	Aset

1.3.1.	PT DAS dan PT NBA Belum Menyelesaikan Seluruh Kewajiban dan Tanggung Jawab kepada BPPT atas KSO Pesawat yang Sudah Berakhir
1.3.2.	Pengelolaan Aset Tetap Berupa Pesawat Terbang dan Komponen Lainnya Tidak Sesuai Ketentuan

Berdasarkan temuan diatas, temuan yang akan kami bahas lebih lanjut adalah temuan yang menurut BPK memuat pokok-pokok kelemahan yang material baik dalam SPI maupun Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

# HASIL PEMERIKSAAN BPK RI ATAS LAPORAN KEUANGAN BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL TAHUN 2016



Pemeriksaan atas Laporan Keuangan (LK) Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) Tahun 2016 bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran LK BATAN dengan memperhatikan:

- Kesesuaian LK BATAN dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
- Kecukupan pengungkapan informasi keuangan dalam LK sesuai dengan pengungkapan yang seharusnya dibuat seperti disebutkan SAP;
- Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan pelaporan keuangan; dan
- Efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI).



BPK memberikan opini:  
**Wajar Tanpa  
Pengecualian  
(WTP)**

## Laporan Realisasi Anggaran

- Pendapatan(PNBP)**  
Rp30.229.332.961,00
- Anggaran Belanja**  
Rp761.791.148.000,00
- Realisasi Belanja**  
Rp729.121.640.910,00 (95.71%)



## NERACA

- Aset**  
Rp2.2.806.948.716.312,00
- Kewajiban**  
Rp5.245.353.571,00
- Ekuitas**  
Rp2.801.703.361.741,00



## Temuan

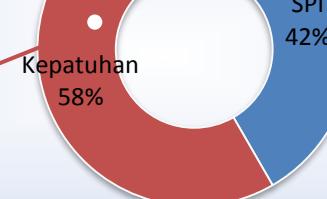
### Kepatuhan Perundang- undangan 7 Temuan

- Kerugian**  
Rp228,50 Juta
- Kurang Penerimaan**  
Rp48,38 Juta



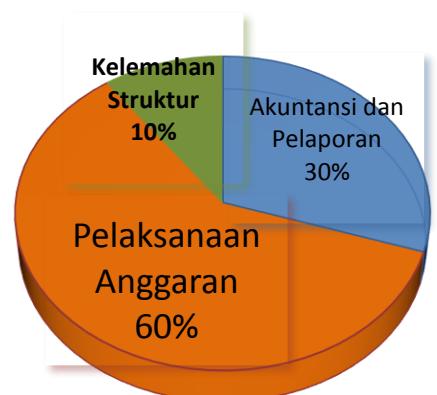
### Sistem Pengendalian Intern

**5 Temuan**

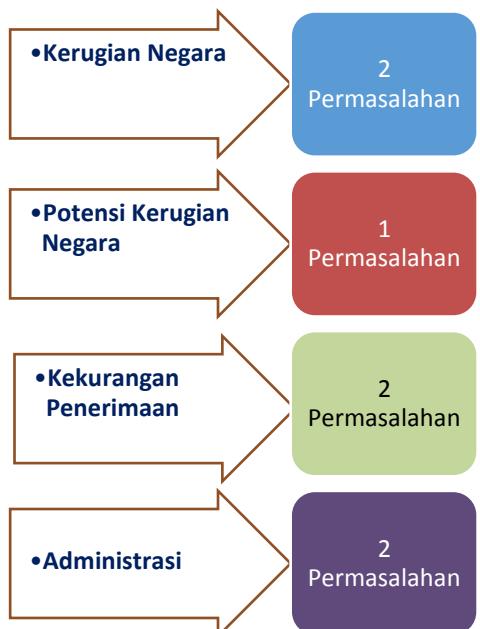
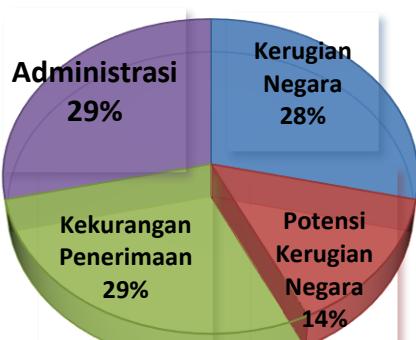


# PERMASALAHAN

## Sistem Pengendalian Intern



## Kepatuhan Terhadap Perundang-undangan



Berikut ini merupakan hasil temuan yang diungkap oleh BPK RI atas pemeriksaan LK BATAN Tahun 2016

NO	TEMUAN
<b>SISTEM PENGENDALIAN INTERN</b>	
1.1	Sistem Pengendalian Manajemen
1.1.1.	Penatausahaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Piutang BATAN Tidak Tertib
1.2	Sistem Pengendalian Belanja
1.2.1	Anggaran Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal Direalisasikan Tidak Sesuai Klasifikasi Belanja Sebesar Rp1,00 Miliar
1.2.2.	Pengelolaan Dana Hibah Belum Tertib
1.3	Sistem Pengendalian Aset
1.3.1.	Penatausahaan Persediaan pada Satuan Kerja PTKMR dan PDL Tidak Tertib
1.3.2.	Tanah Milik BATAN yang Dikuasai Pihak Ketiga Berpotensi Hilang
<b>KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</b>	
1.1	Pendapatan
1.1.1.	Pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) Tidak Sesuai Ketentuan
1.1.2.	Layanan Jasa PNBP pada Satker PTKMR, PTBBN, dan PRSG Tidak Tertib
1.2	Belanja
1.2.1.	Pembayaran Tunjangan Kinerja 90% kepada Pegawai Tugas Belajar Tidak Sesuai Ketentuan Sebesar Rp56,25 Juta
1.2.2.	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh pada Satker PTKRN dan PTKMR Direalisasikan Tidak Sesuai Ketentuan Sebesar Rp148,78 Juta
1.2.3.	Proses Pengadaan Langsung atas Peralatan dan Mesin pada Satker PTKMR, PKSEN dan PAIR Tidak Sesuai Ketentuan Sebesar Rp172,25 Juta
1.2.4.	Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Belum Dikenakan Denda Sebesar Rp15,28 Juta
1.3	Aset
1.3.1.	Piutang Sewa Tanah kepada PT INUKI Berpotensi Tidak Tertagih Sebesar Rp1,79 Miliar, Kehilangan Potensi Pendapatan Sebesar Rp1,03 Miliar dan Denda Minimal Sebesar Rp323.87 Juta

Berdasarkan temuan diatas, temuan yang akan kami bahas lebih lanjut adalah temuan yang menurut BPK memuat pokok-pokok kelemahan yang material baik dalam SPI maupun Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

# HASIL PEMERIKSAAN BPK RI ATAS LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TAHUN 2016



Pemeriksaan atas Laporan Keuangan (LK) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Tahun 2016 bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran LK ESDM dengan memperhatikan:

- Kesesuaian LK ESDM dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
- Kekurukan pengungkapan informasi keuangan dalam LK sesuai dengan pengungkapan yang seharusnya dibuat seperti disebutkan SAP;
- Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan pelaporan keuangan; dan
- Efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI).



BPK memberikan opini:  
**Wajar Tanpa  
Pengecualian  
(WTP)**

## Laporan Realisasi Anggaran

- Pendapatan(PNBP)  
Rp30.159.093.264.884,00
- Anggaran Belanja  
Rp7.754.599.715.000,00
- Realisasi Belanja  
Rp5.889.144.296.978,00 (75.94%)



## NERACA

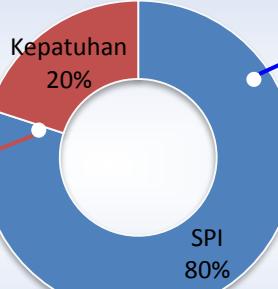
- Aset  
Rp15.465.687.275.768,00
- Kewajiban  
Rp289.068.421.036,00
- Ekuitas  
Rp15.176.618.854.732,00



## Temuan

### Kepatuhan Perundang- undangan 2 Temuan

- Kurang Penerimaan  
Rp22.152,50 Juta



### Sistem Pengendalian Intern

**8 Temuan**

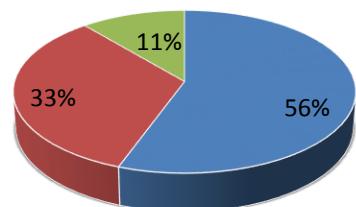


# PERMASALAHAN

## Sistem Pengendalian Intern

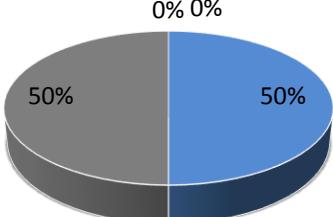


- Akuntansi dan Pelaporan
- Pelaksanaan Anggaran
- Kelemahan Struktur



## Kepatuhan Terhadap Perundang-undangan

- Kerugian Negara
- Potensi Kerugian Negara
- Kekurangan Penerimaan
- Administrasi



Berikut ini merupakan hasil temuan yang diungkap oleh BPK RI atas pemeriksaan LK Kementerian ESDM Tahun 2016

NO	TEMUAN
<b>SISTEM PENGENDALIAN INTERN</b>	
1.1	Pendapatan
1.1.1	Peraturan dan Perhitungan Denda atas Pembayaran Iuran pada BPH Migas yang Melewati Batas Waktu Belum Memadai
1.2	Belanja
1.2.1.	Pembayaran Tunggakan pada Sekretariat Jenderal Tidak Sesuai Ketentuan
1.3	Piutang
1.3.1.	Penatausahaan Piutang Bukan Pajak pada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Belum Memadai
1.3.2.	Piutang pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi Lembaga Minyak dan Gas Bumi (PPPTMGB LEMIGAS) sebesar Rp6.365.641.768,28 Tidak Didukung dengan Dokumen Perikatan/Perjanjian yang Lengkap dan Sah
1.3.3.	Penatausahaan Piutang Iuran Badan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi Belum Memadai
1.4	Persediaan
1.4.1	Penatausahaan Persediaan pada Kementerian ESDM Belum Memadai
1.5	Aset Tetap
1.5.1.	Penatausahaan Aset Tetap pada Kementerian ESDM Belum Memadai
1.6	Aset Tak Berwujud
1.6.1.	Aset Tak Berwujud berupa Data Minyak dan Gas Bumi Belum Disajikan pada Neraca
<b>KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</b>	
1.1	Pendapatan
1.1.1.	Terdapat Kurang Bayar luran Tetap Ditambah Denda Sebesar USD12,357.58 serta Kurang Bayar Royalti dan DHPB Ditambah Denda Sebesar USD1,644,934.52 dan Rp6.448.737.422,56
1.2	Belanja
1.2.1.	Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan pada Direktorat Jenderal EBTKE Belum Dikenakan Denda Minimal Sebesar Rp15.703.772.492,71

Berdasarkan temuan diatas, temuan yang akan kami bahas lebih lanjut adalah temuan yang menurut BPK memuat pokok-pokok kelemahan yang material baik dalam SPI maupun Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

# HASIL PEMERIKSAAN BPK RI ATAS LAPORAN KEUANGAN LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA TAHUN 2016



Pemeriksaan atas Laporan Keuangan (LK) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Tahun 2016 bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran LK LIPI dengan memperhatikan:

- Kesesuaian LK LIPI dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
- Kekurupan pengungkapan informasi keuangan dalam LK sesuai dengan pengungkapan yang seharusnya dibuat seperti disebutkan SAP;
- Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan pelaporan keuangan; dan
- Efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI).



BPK memberikan opini:  
**Wajar Tanpa  
Pengecualian  
(WTP)**

## Laporan Realisasi Anggaran

- Pendapatan(PNBP)  
Rp79.912.321.782,00
- Anggaran Belanja  
Rp1.271.241.554.000,00
- Realisasi Belanja  
Rp1.159.525.871.517,00 (91.21%)

## NERACA

- Aset  
Rp8.154.895.380.976,00
- Kewajiban  
Rp5.784.035.347,00
- Ekuitas  
Rp8.149.111.345.629,00

## Temuan

### Kepatuhan Perundang- undangan 8 Temuan

- Kerugian  
Rp236,25 Juta
- Potensi Kerugian  
Rp144,54 Juta
- Kurang Penerimaan  
Rp214,54 Juta

Kepatuhan  
62%

SPI  
38%

### Sistem Pengendalian Intern

5 Temuan

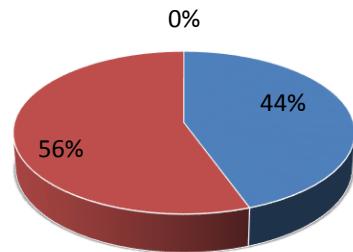


# PERMASALAHAN

## Sistem Pengendalian Intern

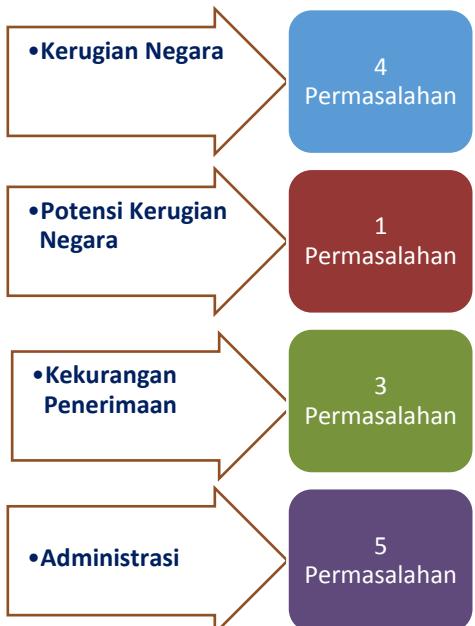
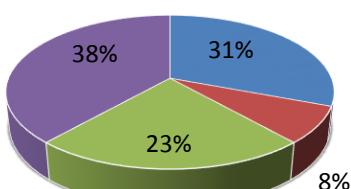


- Akuntansi dan Pelaporan
- Pelaksanaan Anggaran
- Kelemahan Struktur



## Kepatuhan Terhadap Perundang-undangan

- Kerugian Negara
- Potensi Kerugian Negara
- Kekurangan Penerimaan
- Administrasi



Berikut ini merupakan hasil temuan yang diungkap oleh BPK RI atas pemeriksaan LK LIPI Tahun 2016

NO	TEMUAN
	SISTEM PENGENDALIAN INTERN
1.1	Sistem Pengendalian Pendapatan
1.1.1	Pengelolaan Dana Kerjasama Belum Sesuai Ketentuan
1.2	Sistem Pengendalian Aset
1.2.1.	Pemeriksaan Kas dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satker Settama dan Puslit Oseanografi Belum Tertib
1.2.2	Pengelolaan Persediaan pada Tujuh Satker Belum Tertib
1.2.3	Pekerjaan Perencanaan yang Disajikan sebagai Konstruksi dalam Pengerjaan Sebesar Rp290,23 Juta Berpotensi Tidak Bermanfaat
1.2.4.	Penatausahaan dan Penyajian Aset Tak Berwujud Berupa Paten Belum Sesuai Ketentuan
KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	
1.1	Pendapatan
1.1.1.	Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun 2016 pada Satker-Satker Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Terlambat Disetor ke Kas Negara Sebesar Rp1,74 Miliar
1.1.2.	Pemanfaatan Rumah Susun Sederhana Sewa pada Satker Sekretariat Utama Belum Memiliki Dasar Hukum
1.2	Belanja
1.2.1.	Pengadaan Jasa Konsultasi Penyusunan Proses Bisnis Manajemen LIPI Sebesar Rp44,26 Juta serta Ketidakhematan Pembayaran Jasa Koneksi Internet dan Layanan <i>Cloud Server</i> Sebesar Rp7,57 Juta
1.2.2.	Kelebihan Pembayaran Uang Harian Perjalanan Dinas Sebesar Rp33,10 Juta dan Perjalanan Dinas Tidak Didukung Surat Tugas
1.2.3.	Realisasi Belanja Barang Pada Puslit Telimek dan Puslit Metrologi Digunakan Untuk Pembelian Aset Tetap Sebesar Rp463,26 Juta
1.2.4.	Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa Terlambat dan Belum Dikenakan Denda Sebesar Rp114,30 Juta
1.2.5.	Addendum Perpanjangan Waktu Pembangunan Pilot Plant STP LIPI Tahap 1 Tidak Tepat dan Kelebihan Pembayaran Sebesar Rp144,54 Juta
1.2.6.	Kekurangan Volume atas Empat Kegiatan Pengadaan Belanja Modal Sebesar Rp158,89 Juta

Berdasarkan temuan diatas, temuan yang akan kami bahas lebih lanjut adalah temuan yang menurut BPK memuat pokok-pokok kelemahan yang material baik dalam SPI maupun Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

# HASIL PEMERIKSAAN BPK RI ATAS LAPORAN KEUANGAN LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL TAHUN 2016



Pemeriksaan atas Laporan Keuangan (LK) Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) Tahun 2016 bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran LK LAPAN dengan memperhatikan:

- Kesesuaian LK LAPAN dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
- Kekurukan pengungkapan informasi keuangan dalam LK sesuai dengan pengungkapan yang seharusnya dibuat seperti disebutkan SAP;
- Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan pelaporan keuangan; dan
- Efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI).



BPK memberikan opini:  
**Wajar Tanpa  
Pengecualian  
(WTP)**

## Laporan Realisasi Anggaran

- Pendapatan(PNBP)  
Rp9.003.078.641,00
- Anggaran Belanja  
Rp812.251.344.000,00
- Realisasi Belanja  
Rp730.904.574.467,00 (89.99%)

## NERACA

- Aset  
Rp1.569.650.145.702,00
- Kewajiban  
Rp794.699.943,00
- Ekuitas  
Rp1.568.855.445.759,00

## Temuan

### Kepatuhan Perundang- undangan 4 Temuan

- Kerugian  
Rp469,65 Juta
- Kurang Penerimaan  
Rp145,34 Juta

Kepatuhan  
50%

SPI  
50%

### Sistem Pengendalian Intern

4 Temuan



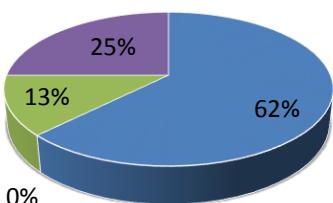
# PERMASALAHAN

## Sistem Pengendalian Intern



## Kepatuhan Terhadap Perundang-undangan

- Kerugian Negara
- Potensi Kerugian Negara
- Kekurangan Penerimaan
- Administrasi



Berikut ini merupakan hasil temuan yang diungkap oleh BPK RI atas pemeriksaan LK LAPAN Tahun 2016

NO	TEMUAN
<b>SISTEM PENGENDALIAN INTERN</b>	
1.1	Sistem Pengendalian Belanja
1.1.1.	Kesalahan Penganggaran Belanja Modal pada Empat Satuan Kerja Sebesar Rp217,12 Juta
1.1.2.	Pengenaan Pajak Penghasilan atas Penerimaan Jasa Giro Bank Sebesar Rp126,76 Juta Tidak Sesuai dengan Ketentuan
1.1.3	Empat Pekerjaan yang Tercatat pada Konstruksi Dalam Pengerjaan Sebesar Rp940,33 Juta pada Dua Satuan Kerja Selama Dua Tahun Tidak Mengalami Perubahan Nilai
1.2	Sistem Pengendalian Aset
1.2.1.	Penunjukan Langsung atas Pengadaan Pembelian Pesawat LSA 02 Sebesar Rp9,88 Miliar tidak Melibatkan Unit Layanan Pengadaan
<b>KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</b>	
1.1	Belanja
1.1.1.	Pembayaran Tunjangan Fungsional, Tunjangan Kinerja, dan Gaji kepada Pegawai LAPAN Tidak Sesuai Ketentuan Sebesar Rp151,83 Juta
1.1.2.	Kelebihan Pembayaran atas Pekerjaan Pencetakan Kalender Dinding dan Kalender Meja Tahun 2017 Sebesar Rp55,68 Juta
1.1.3.	Penyelesaian pekerjaan pengadaan Peralatan Pengamatan Antariksa (Magnetometer) pada Satker Pussainsa Terlambat dan Belum Dikenakan Denda sebesar Rp145,34 Juta. Atas keterlambatan tersebut telah dilakukan penyetoran ke Kas Negara sebesar Rp145,34 Juta
1.1.4.	Kekurangan volume pekerjaan dan perbedaan spesifikasi pada enam satker sebesar Rp262,13 Juta. Atas kekurangan volume dan perbedaan spesifikasi tersebut telah dilakukan penyetoran ke Kas Negara sebesar Rp116,89 Juta

Berdasarkan temuan diatas, temuan yang akan kami bahas lebih lanjut adalah temuan yang menurut BPK memuat pokok-pokok kelemahan yang material baik dalam SPI maupun Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

# HASIL PEMERIKSAAN BPK RI ATAS LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TAHUN 2016



Pemeriksaan atas Laporan Keuangan (LK) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Tahun 2016 bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran LK LHK dengan memperhatikan:

- Kesesuaian LK LHK dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
- Kekurupan pengungkapan informasi keuangan dalam LK sesuai dengan pengungkapan yang seharusnya dibuat seperti disebutkan SAP;
- Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan pelaporan keuangan; dan
- Efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI).



BPK memberikan opini:  
**Wajar Dengan  
Pengecualian  
(WDP)**

## Laporan Realisasi Anggaran

- Pendapatan(PNBP)  
Rp4.588.527.528.028,00
- Anggaran Belanja  
Rp5.953.393.689.000,00
- Realisasi Belanja  
Rp4.883.100.047.436,00 (82%)

## NERACA

- Aset  
Rp6.939.218.624.220,00
- Kewajiban  
Rp49.431.600.911,00
- Ekuitas  
Rp6.889.787.023.309,00

## Temuan

### Kepatuhan Perundang- undangan 4 Temuan

- Kerugian  
Rp2.727,96 Juta
- Kurang Penerimaan  
Rp238,65 Juta



### Sistem Pengendalian Intern

8 Temuan

Kepatuhan

33%

SPI

67%

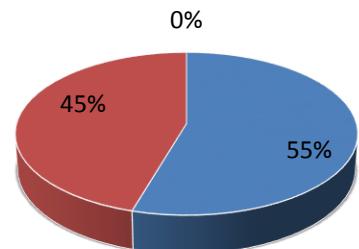


# PERMASALAHAN

## Sistem Pengendalian Intern

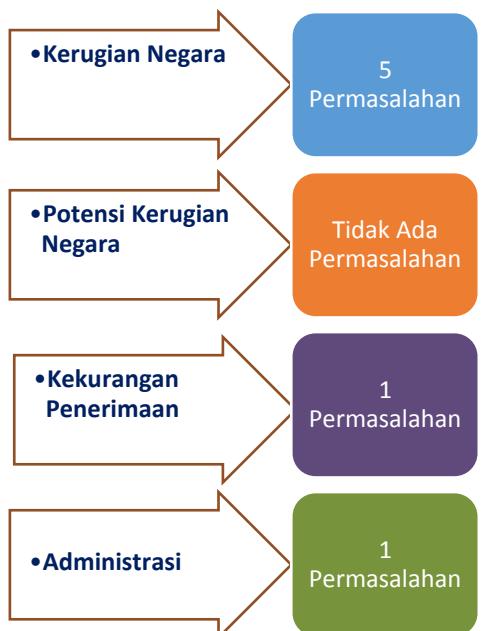
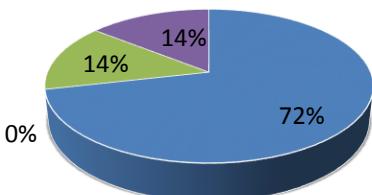


- Akuntansi dan Pelaporan
- Pelaksanaan Anggaran
- Kelemahan Struktur



## Kepatuhan Terhadap Perundang-undangan

- Kerugian Negara
- Potensi Kerugian Negara
- Kekurangan Penerimaan
- Administrasi



Berikut ini merupakan hasil temuan yang diungkap oleh BPK RI atas pemeriksaan LK Kementerian LHK Tahun 2016

NO	TEMUAN
<b>SISTEM PENGENDALIAN INTERN</b>	
1.1	Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP)
1.1.1	Sistem Pengendalian Pencatatan dan Pelaporan atas Pendapatan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam Kehutanan Belum Tertib
1.1.2.	Pendapatan Negara Bukan Pajak PSDH DR atas Izin Pemanfaatan Kayu dari Pembukaan Lahan Berpotensi Tidak Terpungut
1.1.3.	Sistem Pengendalian atas Pengelolaan PNBP dari Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Belum Optimal
1.1.4.	Penerapan SIPUHH <i>On Line</i> Belum Optimal Dalam Memantau dan Mengawasi PNBP PSDH dan DR
1.2	Aset Tetap
1.2.1.	Inventarisasi Aset Tetap Eks Satker Likuidasi Belum Dilaksanakan Dengan Tertib
1.2.2.	Aset Tetap pada Lima Satuan Kerja Belum Dilengkapi Bukti Kepemilikan
1.3	Persediaan
1.3.1.	Sistem Pengendalian dan Pelaporan Persediaan pada Enam Satker Belum Tertib
1.4	Piutang Pajak
1.4.1.	Penatausahaan Piutang Bukan Pajak pada Ditjen PHPL dan Sekretariat Jenderal Belum Tertib Sehingga Tidak Diyakini Kewajaran Pencatatan Piutang sebesar Rp62.613.491.024,60
<b>KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</b>	
1.1	Penyimpangan atas Realisasi Belanja Perjalanan Dinas Sebesar Rp1.624.413.052,40
1.2	Kelebihan Pembayaran atas Beban Anggaran Belanja Barang dan Belanja Modal Sebesar Rp935.951.726,00
1.3	Kekurangan Volume Pekerjaan atas Belanja Barang dan Belanja Modal pada 12 Paket Kegiatan Sebesar Rp360.205.376,48
1.4	Keterlambatan Pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa yang Belum Dikenakan Denda Sebesar Rp238.657.276,10

Berdasarkan temuan diatas, temuan yang akan kami bahas lebih lanjut adalah temuan yang menurut BPK memuat pokok-pokok kelemahan yang material baik dalam SPI maupun Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

# HASIL PEMERIKSAAN BPK RI ATAS LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TAHUN 2016



Pemeriksaan atas Laporan Keuangan (LK) Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Ristekdikti) Tahun 2016 bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran LK Ristekdikti dengan memperhatikan:

- Kesesuaian LK Ristekdikti dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
- Kecukupan pengungkapan informasi keuangan dalam LK sesuai dengan pengungkapan yang seharusnya dibuat seperti disebutkan SAP;
- Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan pelaporan keuangan; dan
- Efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI).



BPK memberikan opini:  
**Wajar Tanpa  
Pengecualian  
(WTP)**

## Laporan Realisasi Anggaran

- Pendapatan(PNBP)  
Rp12.478.857.678.914,00
- Anggaran Belanja  
Rp44.185.547.809.000,00
- Realisasi Belanja  
Rp37.671.482.591.784,00 (85.26%)

## NERACA

- Aset  
Rp106.209.725.629.497,00
- Kewajiban  
Rp1.467.723.293.754,00
- Ekuitas  
Rp104.742.002.335.743,00

## Temuan

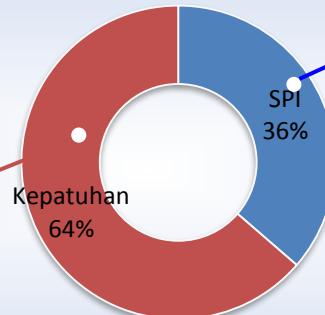
### Kepatuhan Perundang- undangan 28 Temuan

- Kerugian  
Rp35.528,07 Juta
- Kurang Penerimaan  
Rp181.303,28 Juta



### Sistem Pengendalian Intern

**16 Temuan**

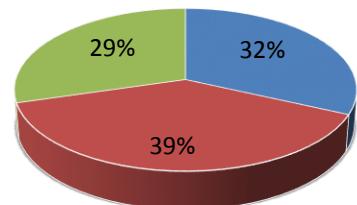


# PERMASALAHAN

## Sistem Pengendalian Intern

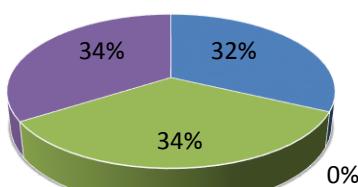


- Akuntansi dan Pelaporan
- Pelaksanaan Anggaran
- Kelemahan Struktur



## Kepatuhan Terhadap Perundang-undangan

- Kerugian Negara
- Potensi Kerugian Negara
- Kekurangan Penerimaan
- Administrasi



Berikut ini merupakan hasil temuan yang diungkap oleh BPK RI atas pemeriksaan LK Kementerian Ristekdikti Tahun 2016

NO	TEMUAN
<b>SISTEM PENGENDALIAN INTERN</b>	
1.	Penyajian atas Laporan Keuangan (LK) Kemenristekdikti Tahun 2016
1.1.	Proses Penyusunan LK Tahun 2016 Belum Didukung Sistem yang Memadai
1.2.	Kemenristekdikti Belum Optimal Melakukan Koreksi Penyajian atas Akun Kas dan Bank yang Dikecualikan dalam LK Tahun 2015 dan Terdapat Perbedaan Jumlah Rekening Menurut Kemenristekdikti dengan Kementerian Keuangan
1.3.	Pengelolaan Investasi Jangka Pendek Senilai Rp2,02 Miliar pada UNG Tidak Sesuai Ketentuan dan Potensi Temuan BPK senilai Rp545,56 Juta Tidak Ditindaklanjuti Sesuai Dengan Rekomendasi
1.4.	Penyajian Piutang di Lingkungan Kemenristekdikti Belum Menggambarkan Keadaan yang Sebenarnya
1.5.	Penatausahaan dan Penyajian Persediaan Kemenristekdikti Belum Memadai
1.6.	Pengungkapan Konstruksi Dalam Pengerajan (KDP) Tidak Memadai dan Terdapat KDP Terbengkalai Sebesar Rp1,21 Triliun
1.7.	Penatausahaan dan Pengamanan Aset Tetap Belum Memadai
1.8.	Aset Tidak Berwujud (ATB) Belum Seluruhnya Diamortisasi dan Tidak Disajikan Secara Lengkap pada LK Kemenristekdikti Tahun 2016
1.9.	Proses Penegerian pada UPN Veteran Yogyakarta, Jakarta, Jawa Timur dan Unsil Belum Sepenuhnya Tercerminkan dalam Laporan Keuangan Tahun 2016
2.	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara
2.1.	Penatausahaan dan Pengelolaan Pendapatan Tidak Tertib
2.1.1.	Penatausahaan Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan Pada Empat Satker Belum Memadai
2.1.1.	Pengelolaan Pendapatan atas Pemanfaatan Aset pada Lima Satker Belum Memadai
2.1.3.	Pengelolaan Pendapatan atas Kerjasama Unpad Belum Memadai
2.2.	Penatausahaan dan Pengelolaan Belanja Tidak Tertib
2.2.1.	Penggunaan Mata Anggaran Pengeluaran Belanja Barang Tidak Tepat Sebesar Rp23,87 Miliar
2.2.2.	Pelaksanaan Kegiatan Penelitian pada LPPM UT Belum Sesuai dengan Pedoman yang Berlaku dan Keterlambatan Penyetoran Sisa Dana ke Kas BLU
2.2.3.	Realisasi Belanja Modal Sebesar Rp11,98 Miliar Digunakan Bukan Untuk Menghasilkan Aset Tetap
2.2.4.	Pengelolaan Program Bidikmisi dan ADik pada Ditjen Belmawa Kurang Optimal
<b>KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</b>	
1.1	Pendapatan

1.1.1.	Sisa Penggunaan Langsung Penerimaan Satker Kemenristekdikt TA 2016 Belum Disetor Sebesar Rp962,34 Juta dan Penggunaan Tidak Wajar Sebesar Rp11,98 Miliar
1.1.2.	PNBP Belum Memiliki Dasar Penetapan Tarif pada Empat Satker Kemenristekdikt Sebesar Rp7,42 Miliar
1.1.3.	Pendapatan Belum/Kurang Pungut pada 14 Satker Sebesar Rp16,39 Miliar
1.1.4.	PNBP Sebesar Rp489,15 Miliar pada Enam Satker Terlambat Disetor dan Sebesar Rp609,86 Juta pada Tiga Satker Belum Disetor Ke Kas Negara
1.1.5.	Pengenaan PPh Atas Jasa Giro pada Rekening Milik Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
1.2	Belanja
1.2.1.	Belanja Pegawai
1.2.1.1.	Kelebihan Pembayaran Belanja Pegawai pada 13 Satker Sebesar Rp6,90 Miliar
1.2.2.	Belanja Barang
1.2.2.1.	Kelebihan Pembayaran Belanja Barang pada 25 Satker Sebesar Rp21,67 Miliar
1.2.2.2.	Pembayaran Honorarium dan Tunjangan pada 15 Satker Tidak Sesuai SBM TA 2016 Sebesar Rp27,72 Miliar
1.2.2.3.	Belanja Barang pada 13 Satker Tidak Didukung Bukti Pertanggungjawaban Sebesar Rp180,93 Miliar
1.2.2.4.	Dana Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Dikenakan Pemotongan Sebesar Rp498,50 Juta
1.2.2.5.	Laporan Penggunaan Dana Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang Disalurkan kepada Peneliti di Perguruan Tinggi Tahun 2016 Belum Diunggah Sebesar Rp53,07 Miliar dan Sisa Dana Sebesar Rp6,56 Miliar Belum Disetorkan Ke Kas Negara
1.2.2.6.	Sisa Belanja Barang Non Operasional Lainnya pada PTN dan Satker Belum Disetorkan Ke Kas Negara Sebesar Rp7,02 Miliar
1.2.2.7.	Proses Pengadaan Tidak Sesuai Ketentuan dan Berindikasi Kemahalan Harga Sebesar Rp1,83 Miliar Serta Tidak Diyakini Sebesar Rp544,60 Juta
1.2.2.8.	Pajak atas Belanja Barang pada Tiga Satker Kurang Dipungut Sebesar Rp543,88 Juta
1.2.2.9.	Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa Pada Tiga Satker Terlambat dan Belum Dikenakan Denda Sebesar Rp399,81 Juta
1.2.2.10.	Kekurangan Volume Pekerjaan pada Sepuluh Satker Sebesar Rp1,17 Miliar
1.2.2.11.	Keterlambatan Peneliti Mengunggah Laporan Akhir Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat TA 2016 Belum Dikenakan Sanksi Denda Sebesar Rp5,32 Miliar dan Pemberian Dana Penelitian Tahun 2016 Sebesar Rp39,94 Miliar Tidak Sesuai Ketentuan
1.2.2.12.	Dana Penelitian Atas Tim Penelitian yang Tidak Mengikuti Monev Eksternal Sebesar Rp2,44 Miliar Belum Dikembalikan Ke Kas Negara

1.2.2.13.	Realisasi Bantuan Biaya Pendidikan pada Universitas Negeri Gorontalo Sebesar Rp163,57 Juta Tidak Sesuai Ketentuan
1.2.2.14.	Belanja Perjalanan Dinas Paket <i>Meeting</i> Luar Kota pada Ditjen SDID Direalisasikan Berupa Belanja Makan Minum Pegawai Sebesar Rp166,52 juta
1.2.3.	Belanja Modal
1.2.3.1.	Kekurangan Volume dan Kelebihan Bayar atas 37 Paket Pekerjaan pada 15 Satker Sebesar Rp2,29 Miliar
1.2.3.2.	Penyelesaian 19 Paket Pekerjaan pada Delapan Satker Terlambat dan Belum Dikenakan Denda Sebesar Rp2,30 Miliar
1.2.3.3.	Pelaksanaan Empat Paket Pekerjaan pada Universitas Nusa Cendana Tidak Sesuai Spesifikasi Teknis Sebesar Rp644,04 Juta
1.2.3.4.	Pelaksanaan 30 Paket Pekerjaan pada Empat Satker Tidak Mempertimbangkan Harga Barang/Jasa yang Lebih Rendah Mengakibatkan Pemborosan Sebesar Rp1,69 Miliar
1.2.3.5.	Biaya Langsung Non Personil atas Dua Pekerjaan Jasa Konsultansi pada Dua Satker Kemenristekdikti Belum Didukung Bukti Pertanggungjawaban
1.2.3.6.	Pemecahan Pekerjaan Pembuatan Kolam Renang Untuk Menghindari Pelelangan pada Unpatti
1.2.4.	Belanja Bantuan Sosial
1.2.4.1.	Pengelolaan Belanja Bantuan Sosial Belum Optimal
1.3	Proses Penegeration pada UPN Veteran Yogyakarta, Jakarta, Jawa Timur dan Unsil Belum Sepenuhnya Sesuai Dengan Peraturan Presiden

Berdasarkan temuan diatas, temuan yang akan kami bahas lebih lanjut adalah temuan yang menurut BPK memuat pokok-pokok kelemahan yang material baik dalam SPI maupun Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

# HASIL PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU BPK RI ATAS KONTRAK KARYA PT FREEPORT INDONESIA (PTFI) TAHUN 2016 SAMPAI DENGAN 2015



Pemeriksaan ini bertujuan untuk menguji dan menilai apakah:

1. PTFI telah patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan dan PNBP (royalti dan iuran tetap) serta bea keluar ekspor;
2. Perpanjangan kontrak yang akan dilakukan PTFI sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
3. PTFI telah mematuhi semua peraturan terkait lingkungan hidup di semua wilayah yang dikuasai dan dieksplorasinya;
4. Divestasi saham PTFI telah berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BPK menyimpulkan:  
**Pengelolaan pertambangan mineral belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku**

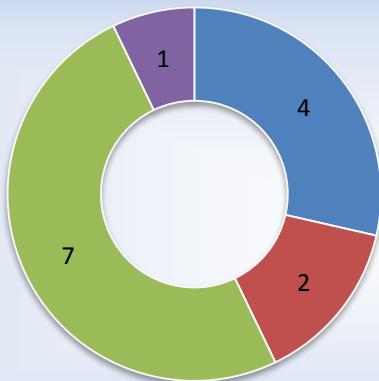
## Aspek Penerimaan Negara

- Potensi Peningkatan Penerimaan USD445,967,326.90
- Kekurangan Penerimaan Royalti USD181,459.93

## Aspek Perpanjangan Kontrak

- Potensi Peningkatan Nilai Tambah Mineral USD135,904,449.35

## Aspek Temuan



■ Penerimaan Negara

■ Perpanjangan Kontrak Karya

■ Lingkungan Hidup

■ Divestasi Saham



Berikut ini merupakan hasil temuan yang diungkap oleh BPK RI atas pemeriksaan PDTT PTFI Tahun 2016

NO	TEMUAN
<b>PDTT PENERAPAN KK PT FREEPORT TA 2013 s.d 2015</b>	
1.1	Terdapat Potensi Peningkatan Penerimaan Negara dari Iuran Tetap dan Iuran Produksi/Royalti PTFI Selama Periode Tahun 2009 Sampai Dengan Tahun 2015 Sebesar USD445,967,326.90
1.2	Kelebihan Pembebaan Biaya <i>Concentrate Handling</i> Pada PTFI Tahun 2013 s.d. 2015 Mengakibatkan Kekurangan Penerimaan Royalti Sebesar USD181,459.93
1.3	Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Yang Dilakukan PT Kuala Pelabuhan Indonesia Pada PTFI Tidak Sesuai Dengan Peraturan Perundangan-Undangan
1.4	Pengawasan dan Pengendalian Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian ESDM dalam Penatausahaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Pemasaran Produk Hasil Tambang PTFI Masih Lemah
1.5	Terdapat Potensi Peningkatan Nilai Tambah Mineral Minimal Sebesar USD135,904,449.35 yang Tertunda Akibat Belum Terlaksananya Pembangunan Fasilitas Pemurnian PTFI
1.6	Pencuitan Luas dan Status Blok B Pada Wilayah Kontrak Karya PTFI Belum Ditetapkan Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku
1.7	PTFI Menggunakan Kawasan Hutan Lindung Dalam Kegiatan Operasionalnya Seluas Minimal 4.535,93 Ha Tanpa Izin dan Hal Ini Bertentangan Dengan UU Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999 Jo UU Nomor 19 Tahun 2004
1.8	PTFI Melaksanakan Kegiatan Operasional Pertambangan Deep Mill Level Zone (DMLZ) serta Memperpanjang Tanggul Barat dan Timur Tanpa Izin Lingkungan
1.9	PTFI Telah Menimbulkan Perubahan Ekosistem Akibat Pembuangan Limbah Operasional Penambangan ( <i>Tailing</i> ) di Sungai, Hutan, <i>Estuary</i> dan Telah Mencapai Kawasan Laut
1.10	Terdapat Kelebihan Pencairan Jaminan Reklamasi PTFI Sebesar USD1,434,994.33 yang Seharusnya Masih Ditempatkan pada Pemerintah Indonesia
1.11	Pengawasan Kementerian ESDM dan Kementerian LHK atas Pengelolaan Lingkungan PT Freeport Indonesia Belum Dilaksanakan Sesuai Peraturan Yang Berlaku
1.12	PTFI Belum Menyerahkan Kewajiban Penempatan Jaminan Pascatambang Kepada Pemerintah Indonesia Untuk Periode 2016 Sebesar USD22,286,839.11 dari Total Kewajiban Periode 2016-2019 Sebesar USD353,759,351.00
1.13	Perizinan serta Implementasi Pengelolaan Limbah <i>Tailing</i> PTFI Tidak Memadai
1.14	Kepesertaan Pemerintah Indonesia pada Saham PTFI Melalui Mekanisme Divestasi Saham Tidak Optimal karena Terbitnya Peraturan Perundangan yang Bersifat Lebih Meringankan Kewajiban Divestasi PTFI

Berdasarkan temuan diatas, temuan yang akan kami bahas lebih lanjut adalah temuan yang menurut BPK memuat pokok-pokok kelemahan yang material baik dalam SPI maupun Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

# HASIL PEMERIKSAAN BPK RI ATAS LAPORAN KEUANGAN LOAN INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT (IBRD) NO. 8245-ID TAHUN 2016



Pemeriksaan atas Laporan Keuangan (LK) Loan International Bank For Reconstruction and Development (IBRD) NO. 8245-ID Tahun 2016 bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran LK Loan IBRD NO. 8245-ID dengan memperhatikan:

- Kesesuaian LK Loan IBRD NO. 8245-ID dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
- Kecukupan pengungkapan informasi keuangan dalam LK sesuai dengan pengungkapan yang seharusnya dibuat seperti disebutkan SAP;
- Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan pelaporan keuangan; dan
- Efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI).



BPK memberikan opini:  
**Wajar Tanpa  
Pengecualian  
(WTP)**

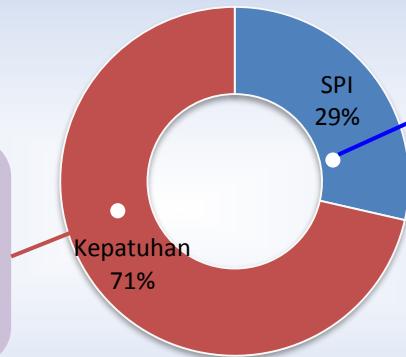
## Laporan Realisasi Anggaran

- **Anggaran Belanja**  
Rp330.930.000.000,00
- **Realisasi Belanja**  
Rp208.678.538.264,00 (63.06%)

## Temuan

### Kepatuhan Perundang- undangan **5 Temuan**

- Kerugian  
Rp5.428,84 Juta



**Sistem Pengendalian Intern  
2 Temuan**



Berikut ini merupakan hasil temuan yang diungkap oleh BPK RI atas pemeriksaan LK Loan IBRD No. 8245-ID Tahun 2016

NO	TEMUAN
<b>SISTEM PENGENDALIAN INTERN</b>	
1.1	Pembayaran <i>Tuition Fee, Living Allowance</i> dan <i>Book Allowance</i> Karyasiswa Program Gelar RISET PRO Terlambat
1.2	Laporan Kemajuan Belajar Karyasiswa Gelar Tidak Disampaikan Secara Tertib dan Laporan Karyasiswa Non Gelar Tidak Dimonitor Dengan Baik
<b>KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</b>	
1.1	Kelebihan Pembayaran <i>Living Allowance</i> dan <i>Tuition Fee</i> Untuk Karyasiswa Program Non Gelar Sebesar USD3.06 ribu, SGD1.86 ribu dan Rp3,63 Miliar
1.2	Kelebihan Pembayaran <i>Tuition Fee, Living Allowance, Book Allowance Dan Typing Allowance</i> Kepada Tiga Orang Karyasiswa Aktif Program Gelar Sebesar GBP1.02 Ribu; EUR567, dan JPY16.60 Ribu
1.3	Kelebihan Pembayaran <i>Living Allowance Dan Book Allowance</i> Kepada Dua Orang Karyasiswa Program Gelar Yang Gagal Melanjutkan Studi Sebesar EUR9.59 Ribu dan USD5.31 Ribu
1.4	Kelebihan Pembayaran <i>Living Allowance Dan Book Allowance</i> Untuk Sembilan Orang Karyasiswa Program Gelar Yang Telah Menyelesaikan Pendidikan Sebesar GBP56.36 Ribu, AUD7.21 Ribu, JPY179.61 Ribu
1.5	Realisasi Belanja Perjalanan Dinas dan Honorarium Narasumber Tidak Didukung Bukti Pertanggungjawaban Sebesar Rp214,70 Juta dan Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Sebesar Rp260,32 Juta

Berdasarkan temuan diatas, temuan yang akan kami bahas lebih lanjut adalah temuan yang menurut BPK memuat pokok-pokok kelemahan yang material baik dalam SPI maupun Kepatuhan terhadap peraturan perundangan-undangan.